

BAB III

KONDISI GEOGRAFIS DAN SOSIAL KABUPATEN MAJA PADA MASA KEPEMIMPINAN BUPATI RADEN TOEMENGGONG DENDANEGERA

3.1 Kondisi Geografis Kabupaten Maja Tahun 1819-1839

Pada awal abad ke-19, tepatnya berdasarkan *Besluit* tertanggal 5 Januari 1819 dengan Nomor 23, pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu berada di bawah otoritas Komisaris Jenderal melakukan sebuah reorganisasi administratif yang signifikan di wilayah Residen Cirebon. Salah satu kebijakan utama dalam proses reorganisasi tersebut adalah pembentukan unit pemerintahan baru yang diberi nama Kabupaten Maja. Pembentukan kabupaten ini mencerminkan upaya sistematis dari pemerintah kolonial dalam merestrukturisasi tata kelola wilayah di pedalaman Jawa Barat, yang kala itu dipandang perlu untuk lebih disesuaikan dengan sistem pemerintahan kolonial yang terpusat dan efisien. Secara struktural, keputusan pembentukan Kabupaten Maja membawa implikasi besar terhadap konfigurasi administratif yang telah ada sebelumnya.

Melalui kebijakan tersebut, seluruh bekas wilayah administratif dari dua kabupaten terdahulu, yakni Kabupaten Rajagaluh dan Kabupaten Talaga, digabungkan ke dalam satu kesatuan yurisdiksi yang lebih besar, yaitu Kabupaten Maja. Penggabungan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada struktur sosial dan sistem pemerintahan lokal yang telah lama berakar di masing-masing wilayah tersebut.³⁹

³⁹ *Besluit* No. 23 tanggal 5 Januari 1819; arsip Keresidenan Cirebon, catatan resmi pemerintah Hindia Belanda mengenai pembentukan Kabupaten Maja melalui penggabungan wilayah Rajagaluh dan Talaga

Garis demarkasi wilayah dimulai dari sebuah titik penting di lokasi penyeberangan Karangsambong, yang berfungsi sebagai titik acuan utama. Dari titik tersebut, garis batas membentang ke arah timur mengikuti jalur jalan besar hingga mencapai kawasan Cipicung, yang terletak tidak jauh dari daerah Jamblang. Selanjutnya, batas wilayah berbelok ke arah utara, mengikuti garis batas tradisional yang telah lama menjadi penanda antara Kabupaten Rajagaluh dengan Kabupaten Sumedang.

Dari titik ini, garis batas terus mengikuti jalur pegunungan dan menyusuri alur sungai di wilayah hulu hingga tiba di Desa Lengkong, sebuah desa yang berada pada ketinggian dan memiliki nilai strategis dalam konteks geografis. Dari Desa Lengkong, batas wilayah berlanjut mengikuti demarkasi Kabupaten Rajagaluh yang lama hingga mencapai Puncak Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat yang sekaligus menjadi simbol geografis penting bagi wilayah tersebut. Bermula dari puncak gunung, batas administratif menurun ke arah selatan, menyusuri wilayah-wilayah perbukitan dan melalui daerah Cijulang yang merupakan bagian dari perbatasan bekas Kabupaten Talaga. Jalur batas ini kemudian melengkung kembali ke titik semula di Karangsambong, yang secara administratif juga menandai batas antara wilayah Kabupaten Maja dengan Keresidenan Cirebon.⁴⁰

Sebagai pemimpin pertama untuk kabupaten yang baru dibentuk ini, Komisaris Jenderal Hindia Belanda menunjuk Raden Toemenggoeng Dendanegara sebagai

⁴⁰ Kartika. N. (2007). *Sejarah Majalengka: Sindangkasih-Maja-Majalengka*. hlm 49

Bupati Maja. Di bawah kepemimpinannya, wilayah seluas 1.200 km² ini pada awalnya terbagi menjadi tiga distrik utama yaitu Talaga, Sindangkasih, dan Rajagaluh. Secara geografis, Kabupaten Maja dikelilingi oleh Kabupaten Sumedang di sisi barat, Cirebon dan Kuningan di timur, Indramayu di utara, serta Galuh dan Sukapura di sebelah selatan.

Seiring berjalannya waktu, wilayah ini terus berkembang. Pada dekade 1830-an, dilakukan pemekaran administratif yang membagi Kabupaten Maja menjadi enam distrik yang lebih kecil, yaitu Maja, Sindangkasih, Rajagaluh, Talaga, Palimanan, dan Kadongdong, menandai babak baru dalam sejarah pemerintahannya.⁴¹

Gambar 2: Batas Distrik Kabupaten Maja Sekitar Tahun 1830-an



Sumber: Diolah dari M.R. Fernando.1982. *Peasant and Plantation Economy: The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon Residency from the Cultivation System to the End of First Decade of the Twentieth Century*. Ph.D. Dissertation.
Melbourne: Monash University.Hlm. 19.

⁴¹ *Ibid.*Hlm 43

Kondisi geografis Kabupaten Maja selama masa pemerintahan Raden Toemenggoeng Dendanegara (1819–1839) mencerminkan dampak yang sangat nyata dari sistem eksploitasi kolonial, khususnya melalui kebijakan kerja paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, serta menunjukkan berbagai upaya protektif yang dilakukan oleh otoritas lokal untuk melindungi rakyat dari penderitaan yang lebih luas.

Berdasarkan data yang bersumber dari arsip kolonial serta hasil kajian demografi historis, diketahui bahwa jumlah total penduduk Kabupaten Maja mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam kurun waktu dua dekade tersebut, yaitu dari sekitar 55.000 jiwa pada tahun 1819 menjadi hanya 42.000 jiwa pada tahun 1839.⁴² Penurunan ini merepresentasikan penyusutan populasi sebesar kurang lebih 23 persen dan tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor utama, antara lain pemberlakuan kerja rodi secara massif, peristiwa kelaparan massal yang menyebabkan banyak korban jiwa, serta terjadinya migrasi paksa akibat tekanan kolonial dan situasi ketidakstabilan sosial.⁴³

Selain penurunan kuantitatif, struktur demografi Kabupaten Maja juga mengalami perubahan yang cukup drastis dalam aspek komposisi penduduk, khususnya dalam hal rasio gender. Pada awal masa pemerintahannya, struktur kependudukan menunjukkan proporsi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Namun, memasuki dekade kedua abad ke-19, terjadi ketimpangan demografis yang cukup mencolok, di mana sekitar 65 persen dari total populasi

⁴² Kartika, N. (2007). *Sejarah Majalengka: Sindangkasih-Maja-Majalengka*. hlm 86

⁴³ Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1820 (Batavia: Lands Drukkery, 1820), hlm. 60–61

132.257 jiwa adalah perempuan. Ketidak seimbangan tersebut dipicu oleh tingginya angka kematian di kalangan laki-laki dewasa muda yang menjadi korban kerja paksa dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur kolonial, seperti jalan penghubung antara Cirebon dan Majalengka. Selain itu, tidak sedikit dari mereka yang dijatuhi hukuman politik oleh otoritas kolonial berupa pembuangan ke luar Pulau Jawa, yang secara langsung mengurangi jumlah laki-laki usia produktif di wilayah tersebut.

Perubahan ini menjadi indikator penting yang merefleksikan betapa besar tekanan struktural yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Maja pada masa itu, sekaligus menunjukkan adanya krisis kemanusiaan yang berlangsung secara sistematis akibat kebijakan kolonial yang represif. Situasi ini mendorong Bupati Raden Toemenggung Dendanegara untuk mengambil langkah-langkah protektif sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap rakyat yang dipimpinnya.⁴⁴

Krisis yang melanda Kabupaten Maja mencapai puncaknya pada tahun 1838, ditandai dengan terjadinya bencana kelaparan besar-besaran yang membawa dampak sangat serius terhadap keseluruhan struktur masyarakat. Peristiwa kelaparan ini dilaporkan telah menyebabkan kematian sedikitnya 3.000 jiwa, sebuah angka yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan total populasi wilayah tersebut pada masa itu. Selain korban jiwa, krisis tersebut juga

⁴⁴ Statistiek van den Handel, de Scheepvaart en de In- en Uitvoerregten in Nederlandsch-Indië over het Jaar 1838* [Statistik Perdagangan, Pelayaran, dan Bea Masuk-Keluar di Hindia Belanda untuk Tahun 1838] (Batavia: Departement der Financiën, 1839), Bijlage N (Lampiran N), Arsip Nasional Belanda, Den Haag, *Archief Ministerie van Koloniën: Statistieke bescheiden, 1827–1945*, inventarisnummer 137.

mendorong terjadinya gelombang pengungsian dalam skala besar, di mana sekitar 5.000 orang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke wilayah-wilayah tetangga seperti Cirebon dan Sumedang demi mencari perlindungan dan sumber kehidupan yang lebih layak.⁴⁵

Angka kelahiran di Kabupaten Maja mengalami penurunan tajam hingga mencapai 40 persen selama masa krisis tersebut. Penurunan ini disebabkan oleh memburuknya kondisi gizi masyarakat (malnutrisi kronis) yang berdampak langsung pada kemampuan biologis untuk bereproduksi, serta terjadinya pemisahan keluarga secara paksa baik akibat migrasi internal maupun akibat pengambilan anggota keluarga, khususnya laki-laki, untuk dipekerjakan dalam proyek kerja paksa. Kombinasi dari kematian massal, perpindahan penduduk, dan merosotnya angka kelahiran menciptakan kondisi demografis yang rapuh dan menempatkan Kabupaten Maja dalam situasi yang hampir menyerupai kehancuran sosial.⁴⁶

Masyarakat terbagi dalam empat kelompok utama yaitu petani 76% sebagai korban utama tanam paksa, elite tradisional 12% pendukung Raden Toemenggung Dendanegara (ulama, lurah, seniman), kaki tangan Belanda 7% (mandor, calo pajak), dan budak kerja paksa 5%.⁴⁷ Menghadapi tekanan ini, Raden Toemenggoeng Dendanegara menerapkan kebijakan protektif yaitu menyembunyikan data pemuda dari daftar kerja rodi dengan laporan palsu dan

⁴⁵ *Verslag Gouverneur Java's Westhoek 1838*, Bijl. VII, hlm. 23–25; *Koloniaal Verslag 1839*, hlm. 61–62; Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 312; Breman, *Keuntungan Kolonial*, 178–181.

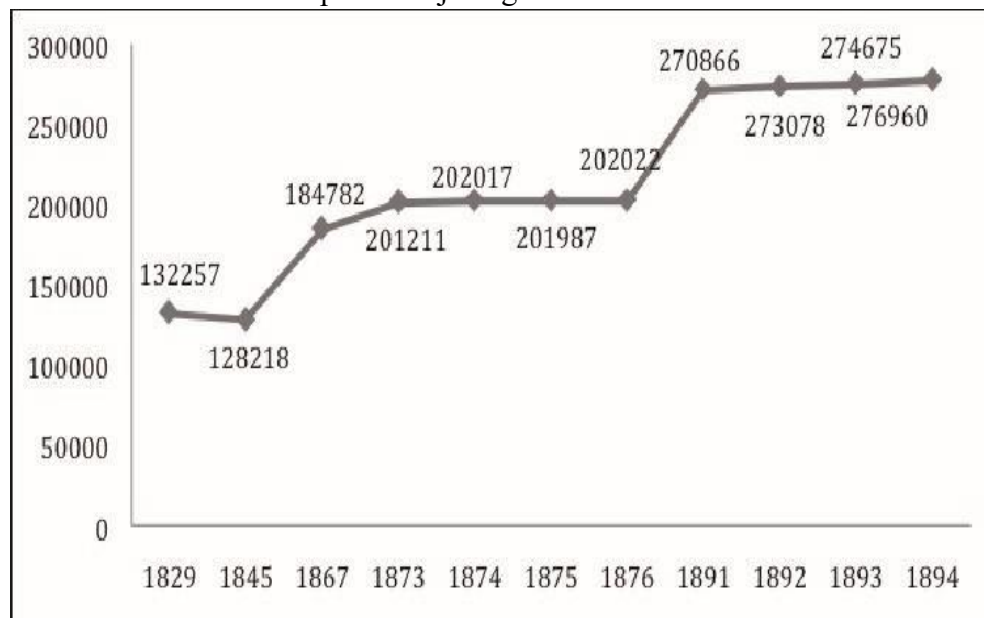
⁴⁶ Catatan Desa Cikaso, Museum Talaga; Kajian Hardjasaputra, 2004

⁴⁷ Hardjasaputra, A. Sobana (2004). *Demografi Priangan Abad ke-19, hlm. 102

wabah penyakit, merelokasi petani dari wilayah rawan pengawasan Belanda (Maja) ke kawasan terpencil di selatan (Talaga), serta mendistribusikan beras dari lumbung desa untuk menyelamatkan 15.000 jiwa dari kelaparan.⁴⁸ Rakyat juga membangun permukiman perlindungan di lereng Gunung Ciremai, menampung 1.500 pengungsi yang menolak kerja paksa.

Populasi baru pulih ke angka 50.000 jiwa pada 1845 setelah Belanda mendatangkan migran paksa dari Brebes.⁴⁹ Data ini membuktikan bahwa di bawah Raden Toemenggoeng Dendanegara, rakyat Maja lebih memilih mati atau mengungsi daripada tunduk pada mesin eksploitasi kolonial, sekaligus menegaskan kegagalan sistem tanam paksa dalam menguasai manusia dan ruang.

Gambar 3: Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Majalengka Tahun 1829 – 1894



Sumber : *Koloniaal Verslag van Nederlandsch (Oost) Indië 1875, Bijlage A, VIII*

⁴⁸ Babad Majalengka, Pupuh XIII

⁴⁹ *Memorie van Overgave Cirebon 1845*

3.2 Kondisi Sosial Kabupaten Maja Tahun 1819-1839

Jumlah penduduk Kabupaten Maja pada masa awal pembentukannya sulit untuk dipastikan secara akurat. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan sumber data historis yang lengkap dan terperinci dari periode tersebut.

Sumber data tertua yang berhasil ditemukan merujuk pada statistik penduduk tahun 1829 yang diterbitkan oleh Pemerintah Keresidenan Cirebon. Berdasarkan data statistik tersebut, populasi Kabupaten Maja pada tahun 1829 tercatat sebanyak 132.257 jiwa.

Komposisi populasi ini didominasi secara signifikan oleh kelompok Pribumi, yang berjumlah 131.273 jiwa atau mencakup 99,26% dari total penduduk. Sementara itu, kelompok non-pribumi hanya berjumlah 984 jiwa, atau setara dengan 0,74% dari keseluruhan populasi. Populasi non-pribumi tersebut dapat dirinci lebih lanjut, dengan komposisi yang terdiri atas kelompok etnis Tionghoa sebesar 98,07% dan kelompok etnis Melayu sebesar 1,93%.⁵⁰

Statistik pada tahun yang sama juga memberikan gambaran mengenai struktur keluarga. Data menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Maja adalah 4,1 jiwa per keluarga. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap keluarga pada umumnya memiliki dua hingga tiga orang anak.

⁵⁰ Falah, M. (2011). Sejarah Sosial Ekonomi Majalengka pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1819-1942). *Patanjala* 3.2 (2011) hlm 193

Tabel 1: Jumlah Penduduk Kabupaten Maja Tahun 1829

Golongan	Keluarga	Jenis Kelamin		Anak-anak di bawah 12 Tahun		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Pribumi	32.037	38.813	42.298	24.007	26.155	131.273
Melayu	6	6	6	3	4	19
Cina	228	317	323	144	181	965
Jumlah	32.271	39.136	42.627	24.154	26.340	132.257

Sumber: Staats der Bevolking: Dienst jaar 1829. Regenstschappen Madja, Residentie Cheribon. Inventaris Arsip Cirebon No.66/3. Jakarta: ANRI.

Pada tahun 1845, jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 13,33% jika dibandingkan dengan data tahun 1829. Penurunan ini terjadi pada seluruh golongan penduduk yang menetap di wilayah kabupaten tersebut. Kelompok penduduk Cina dan Melayu mencatat angka penurunan paling tinggi, masing-masing sebesar 34,82% dan 31,58%. Sementara itu, golongan pribumi mengalami penurunan sebesar 13,21%, yang tergolong lebih rendah dibandingkan kelompok non-pribumi.⁵¹

Sebagai bupati, Raden Toemenggoeng Dendanegara penguasa tradisional terasa kental dalam struktur masyarakat yang amat hierarkis. Di puncak piramida sosial, Raden Toemenggoeng Dendanegara beserta keluarganya dan para pejabat kabupaten (Patih, Wedana, Mantri) hidup dalam kemapanan sebagai elite priyayi. Mereka menikmati hak istimewa dan hasil dari tanah garapan luas (tanah bengkok), sementara busana dan sikap mereka mencerminkan status yang tinggi. Namun, di bawah kaki piramida itu, terhampar kehidupan yang jauh berbeda.⁵² Mayoritas

⁵¹ Ni Nur Aini, *Perubahan Sosial Ekonomi di Kabupaten Majalengka Tahun 1819–1867* (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2016), hlm. 25.

⁵² Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium* Jilid 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 25

rakyat Maja adalah petani penggarap (cacah/sikep) yang mengais nafkah dari tanah kabupaten (tanah cacah) atau tanah milik priyayi. Di lapisan paling bawah, hidup para buruh tani tak bertanah dan golongan marginal yang nyaris tak bersuara, terombang-ambing dalam kemiskinan yang akut.

Bagi rakyat jelata, kehidupan sehari-hari adalah perjuangan menghadapi beban ganda. Dasar ekonomi tradisional bertumpu pada sawah dan tegalan yang menghasilkan padi serta palawija untuk sekadar bertahan hidup. Namun, bayang-bayang panjang pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai mengubah segalanya, terutama sejak tahun 1830. Sistem Tanam Paksa (*cultuurstelsel*) seperti cambuk yang menghantam. Sawah-sawah yang seharusnya ditanami padi harus mengalah untuk kopi, nila (indigo), dan tebu demi memenuhi target Belanda.

Beban ini terasa sangat berat di pundak rakyat, kerja rodi yang melelahkan memanggil mereka untuk membangun jalan, bendungan, atau mengurus perkebunan pemerintah tanpa upah layak, menyita waktu yang berharga untuk menggarap lahan sendiri. Pajak tanah (*landrente*) dalam bentuk hasil padi dan penyerahan wajib sebagian besar hasil tanaman ekspor semakin menggerogoti hasil jerih payah mereka. Kemiskinan bukan lagi ancaman, tapi kenyataan pahit yang merata. Kelaparan mengintai, penyakit seperti malaria dan kolera merajalela di tengah minimnya akses kesehatan, sementara pendidikan hanyalah mimpi bagi anak-anak petani biasa.⁵³

⁵³ *Rapport Resident Preanger 1833*, inv.nr. 3672, bijl. C, hlm. 9; *Statistiek Heerendiensten 1838*; *Koloniaal Verslag 1840*, hlm. 72.

Di tengah kesulitan itu, agama Islam dengan corak Sufi dan tradisionalnya, beserta adat istiadat yang kental, menjadi pelipur lara dan penopang semangat. Suara lantang mengaji dari pesantren dan surau, serta wejangan para kiai di desa-desa, memberikan ketenangan dan tuntunan moral. Nilai-nilai hormat dan taat kepada penguasa tradisional seperti Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tetap dijunjung tinggi dalam budaya masyarakat, meski di baliknya mungkin tersimpan keluh kesah yang tak terucap. Raden Toemenggoeng Dendanegara sendiri, sebagai penjaga adat, menghadapi dilema yang dalam.⁵⁴ Di satu sisi, ia dituntut oleh pejabat Belanda (kontroleur) untuk menjadi ujung tombak pelaksanaan tanam paksa, memastikan target terpenuhi demi mempertahankan kedudukan dan hak istimewanya. Di sisi lain, tanggung jawab tradisionalnya sebagai pemimpin rakyat menuntutnya untuk melindungi. Kenyataan yang terlihat adalah tekanan kolonial sering kali menang pemerintahannya menjadi perpanjangan tangan eksploitasi Belanda.

Struktur sosial masyarakat Maja kala itu didominasi oleh penduduk pribumi berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data sensus tahun 1829, jumlah penduduk tercatat sebanyak 132.257 jiwa, dengan 99,26% adalah golongan pribumi dan hanya 0,74% golongan non-pribumi, mayoritas di antaranya merupakan etnis Cina yang bekerja sebagai pedagang atau buruh.⁵⁵ Masyarakat terbagi dalam struktur sosial tradisional Sunda yang masih kuat: di puncak adalah elite lokal (priyayi) yang terdiri dari keturunan bangsawan Talaga dan Talagamanggung, sementara lapisan

⁵⁴ *Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa Abad XIX* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 77–80.

⁵⁵ Kartika. N. (2007). *Sejarah Majalengka: Sindangkasih-Maja-Majalengka*. Hlm 75

bawah adalah petani, buruh tani, dan pengrajin desa. Dalam tatanan sosial ini, meskipun kekuasaan kolonial telah masuk, struktur feodal lokal tetap dominan di desa-desa melalui kepemimpinan kepala adat, kuwu, dan tokoh keturunan bangsawan.

Dalam aspek ekonomi, kehidupan masyarakat Kabupaten Maja sangat bergantung pada sektor agraris. Mayoritas penduduk mengelola sawah dan kebun untuk menanam padi, sayur-mayur, palawija, kopi, kapul, dan rempah-rempah. Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tercatat sebagai tokoh yang aktif mendukung pembangunan pertanian dengan membangun sistem irigasi baru, mengangkat petugas pengairan (*Anggadikrama*), serta memperlebar jalan-jalan desa agar hasil panen lebih mudah dijual ke pasar. Relasi sosial antara elite dan rakyat pun terjalin dalam model paternalistik yaitu bupati dianggap sebagai pelindung rakyat, sementara rakyat menunjukkan kepatuhan dengan menunaikan pajak dan kerja bakti, termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lahan.

Penerapan tanam paksa (*cultuurstelsel*) pada dekade 1830-an membawa dampak besar pada tatanan sosial agraris di wilayah Cirebon, termasuk Maja. Sistem ini menuntut produksi padi dan kopi dalam jumlah besar, yang harus dipenuhi oleh rakyat dan priyayi lokal.⁵⁶ Di tingkat administratif, masyarakat desa dipimpin oleh kuwu yang bekerja sama dengan pejabat kolonial seperti camat atau asisten residen dalam mengelola urusan pajak, kerja paksa, dan pembagian hasil

⁵⁶ *Statistiek Landbouwgewassen 1830*, inv.nr. 3211, hlm. 14; *Babad Maja*, pupuh XVIII.12; *Rapport Assistent-Resident 1838*, hlm. 3.

tanaman. Hal ini menandai perpaduan antara tatanan adat Sunda dan struktur birokrasi kolonial.

Dominasi kekuasaan kolonial juga terlihat dalam proses pembentukan dan pengelolaan wilayah Kabupaten Maja. Belanda melalui *Staatsblad* No. 9/1819 menetapkan pembentukan kabupaten ini, dan kemudian pada tahun 1840 memindahkan pusat pemerintahan ke Sindangkasih dan mengganti namanya menjadi Kabupaten Majalengka (*Staatsblad* No. 7/1840). Raden Toemenggoeng Dendanegara sendiri merupakan bupati yang ditunjuk langsung oleh Komisaris Jenderal Hindia Belanda, menjadikannya sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial sekaligus pemimpin lokal tradisional.⁵⁷

Di tengah pengaruh kolonial, masyarakat Maja tetap mempertahankan identitas budaya dan religius mereka. Tradisi Sunda-Islam tampak dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik ziarah makam leluhur (seperti Sunan Parung dan Sunan Wanaperih), slametan, manaqiban, serta pelaksanaan upacara adat agraris. Salah satu ritual yang masih bertahan adalah Pareresan Sangiang, yaitu pesta panen yang dilakukan secara komunal sebagai bentuk syukur kepada Sang Hyang Sangiang, simbol kepercayaan terhadap kekuatan alam dan leluhur. Tradisi ini mencerminkan keyakinan masyarakat akan keberkahan alam dan pentingnya harmoni antara manusia dan lingkungan.

Dengan demikian, kondisi sosial Kabupaten Maja selama masa pemerintahan Raden Toemenggung Dendanegara menunjukkan suatu bentuk perpaduan antara

⁵⁷ Saleh Danasasmita dan Anis Djatisunda, *Sejarah Kabupaten Majalengka* (Bandung: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1984), hlm. 55–57

kekuasaan lokal berbasis adat dengan pengaruh administratif dan ekonomi kolonial. Masyarakat agraris hidup di bawah struktur feodal yang kuat, namun perlahan-lahan terserap ke dalam sistem kolonial melalui regulasi pajak, tanam paksa, dan restrukturisasi wilayah. Di sisi lain, kekayaan budaya dan praktik religius lokal tetap bertahan dan menjadi perekat identitas sosial masyarakat Maja di tengah perubahan besar pada awal abad ke-19.⁵⁸

Penulis menempatkan Kabupaten Maja sebagai contoh mikro kegagalan sistem kolonial awal di Jawa. Eksploitasi melalui tanam paksa tidak hanya gagal menguasai manusia dengan adanya penurunan populasi dan migrasi, tetapi juga merusak tatanan sosial ekonomi lokal. Elite feodal seperti Raden Toemenggoeng Dendanegara meski berusaha mengurangi penderitaan ternyata tidak mampu menjadi benteng perlindungan yang efektif. Struktur feodal justru menjadi mitra kolonial dalam menindas rakyat, sementara identitas kultural hanya menjadi pelipur lara tanpa mengubah realitas politik.

Kalimat penutup ini merupakan kesimpulan tragis dari narasi sejarah yang dibangun yaitu kolonialisme awal di Maja adalah cerita tentang penderitaan struktural, kegagalan kepemimpinan lokal, dan benih-benih krisis yang akan terus membayangi.

Kabupaten Maja pada dua dekade itu adalah gambaran suram dari eksploitasi kolonial awal. Kesengsaraan rakyat jelata yang tercekik kerja paksa dan pajak yang mencekik menjadi pemandangan biasa, kontras dengan kemapanan elite di pendopo

⁵⁸ *Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa Abad XIX* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 77–84

kabupaten. Meski belum terdengar gaung perlawanan besar, ketidakpuasan dan kepayahan hidup rakyat Maja menjadi benih-benih keresahan yang tertanam di bumi yang seharusnya subur. Periode kepemimpinan Raden Toemenggoeng Dendanegara menjadi saksi bagaimana mesin penghisap kolonial mulai berderak kencang di tanah Jawa, meninggalkan luka kemiskinan dan keterbelakangan di tengah tegaknya struktur feodal yang kaku.